

A. Judul

OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

Erlita Ratna S, Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum, Dr. Bambang Sugiri, SH. MS

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: litaratna@yahoo.com

B. Abstrak

Abstrak

Pemilihan judul dilatar belakangi oleh fakta penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kota Malang, khususnya pada Kejaksaan Negeri Malang. Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan dalam memberantas korupsi terkesan kurang serius, apakah memang tidak ada praktik kecurangan atau aparat penegak hukum sengaja tidak perduli. Ironis dibandingkan dengan apa yang terjadi, praktik korupsi jelas terlihat dari berbagai sendi kehidupan di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan kendala apa yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang. Penulisan karya tulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan di masyarakat untuk hendak diteliti dari aspek hukum dan penerapan hukumnya. Bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan dan hasil studi literatur, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan, kemudian melakukan analisa data dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan terkait optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Malang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Penyidikan, Kejaksaan, Korupsi.

Abstract

Choosing a title background by the fact of handling cases of corruption in the city of Malang, especially in Malang District Attorney. As for why the Attorney efforts in combating corruption seem less serious, if there is no fraudulent practices or law enforcement officers deliberately not care. Irony in comparison to what is happening, corruption clearly visible from various walks of life in the city of Malang. Based on this, this paper raised the issue of how the formulation of the Attorney's role in the investigation of corruption and obstacles faced and the efforts made in the Malang District Attorney eradicate corruption, especially in jurisdictions Attorney Malang. Writing papers using juridical sociological method, which is a research approach that examines the problems in the community to want to study the legal aspects and the application of the law. Primary and secondary legal materials will be analyzed using descriptive analysis techniques are explained throughout the analytical results of field studies and the results of the study of literature, which is used as a reference in resolving legal issues. The results were obtained answers to the problems, then analyze the data and then used to discuss problems related to the optimization of Malang State Attorney 's role in the investigation of corruption.

Key Word: Investigation, Attorney, Corruption.

C. Pendahuluan

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional maupun pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa "*extraordinary crime*". Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, oleh karena itu dalam penanganan korupsi harus menggunakan cara-cara luar biasa, *extraordinary way*.

Merupakan suatu kewajiban dan pekerjaan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi khususnya di Kota Malang. Menurut laporan masyarakat, laporan lembaga peduli hukum terkait korupsi sering kita dengar, sebagai contoh *Malang Corruptin Watch (MCW)* menyebutkan di tahun 2012 terdapat 4 (empat) kasus korupsi dan dugaan korupsi, dan hingga Kota Malang merupakan kota terkorup ke 3 (tiga) di wilayah Jawa Timur.¹ Dilain pihak surat

¹ Malang Corruption Watch, **Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Jawa Timur Hingga Tahun 2012**,. Malang, Malang Corruption Watch, 2013, hal 6.

kar Jawa Pos Radar Malang menyebut ada 11 (sebelas) kasus korupsi dan dugaan korupsi di Kota Malang.²

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai tempat penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana salah satunya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.³

Pemilihan Kejaksaan Negeri Kota Malang dilatarbelakangi oleh minimnya penanganan kasus tindak pidana korupsi yang berhasil disidik selama ini. Dibuktikan dengan data *pra-survey* yang menyebutkan sejak tahun 2011 hingga 2013 Kejaksaan Negeri Malang hanya mampu menangani 5 (lima) kasus korupsi pada taraf penyidikan. Tahun 2011 dengan 3 (tiga) kasus yang merupakan pengungkapan 3 (tiga) orang tersangka dengan satu skenario kasus, 2012 nihil dengan kata lain tidak ada sama sekali kasus korupsi yang disidik, dan di tahun 2013 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi yang disidik hingga taraf pemberkasan.

Surat kabar Entitas Hukum Indonesia secara tegas menyebut bahwa “Kejaksaan Negeri Malang Ogah-ogahan Berantas Korupsi” kalimat itu merupakan judul dari salah satu artikel yang dibuat untuk mengkritisi kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang selama ini.⁴ Aksi protes berbentuk unjuk rasa dilakukan di halaman Kantor Kejari Kota Malang pada tanggal 14 Januari 2013 oleh kalangan mahasiswa dan ditujukan kepada institusi tersebut yang isinya menuntut untuk aparat hukum mampu memberantas korupsi di Kota

² Jawa Pos, *loc.cit.*

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴ Entitas Hukum Indonesia, 5-17 November 2012, “**Kejaksaan Negeri Malang Ogah-ogahan Berantas Korupsi**”, hal 12.

Malang. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan kualitas, kemampuan, komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁵

Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas korupsi terkesan tidak serius dan berjalan sangat lamban? Apa tidak ada praktik kecurangan atau aparat penegak hukum sengaja tidak peduli akan situasi saat ini, atau ada kendala lain yang menghambat kinerja Kejaksaan Negeri Malang? Disisi lain, media masa sudah sangat jelas bahkan beberapa media dalam hal ini beberapa koran berani menyebut inisial pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi. Namun hingga saat ini berbagai laporan tersebut belum mendapat respon dan tindakan yang tegas serta belum ada upaya lebih lanjut dari aparat penegak hukum.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi penunjang untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dengan memahami secara mendalam suatu sistem maka akan didapatkan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah yakni terkait tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis memutuskan untuk memilih judul optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi studi di kejaksaan negeri malang sebagai tujuan utama dari penulisan laporan skripsi.

D. Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

⁵ Suara Merdeka, **Disorientasi Pemberantasan Korupsi**, 2008, www.google.com (2 Agustus 2012)

E. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk hendak diteliti terutama dari segi aspek hukum dan penerapan hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan dan kepustakaan. Jenis dan sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengadakan penelitian menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang dan responden adalah dua Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Khusus yang pernah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Dalam menganalisa data digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan dan hasil studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan.

Atas dasar kewenangan, fungsi, dan tugas ini maka penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang yang merupakan Kejaksaan Negeri Tipe A. Didasari oleh pembagian pola organisasi didasarkan atas kedudukan, beban kerja, dan atau kekhususan suatu daerah. Mekanisme kerja Kejaksaan Negeri Malang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Sejarah singkat menyebutkan Kejaksaan Negeri Malang mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, pada tahun 1957 berada di Jalan Pattimura Kota Malang dan pada tahun 2005 hingga saat ini berada di Jalan Simping Panji Suroso Nomor 5 Kota Malang.

Tahun 2013 merupakan tahun “Darurat Korupsi” khususnya bagi Kota Malang, hal ini dilandasi oleh hasil gelar perkara oleh masyarakat yang dilakukan pada tanggal 21 November 2013. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat peduli hukum, maklumat ini dikeluarkan di Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya dan disepakati oleh LSM, akademisi, media massa, dan birokrasi antikorupsi.⁶ Kesepakatan ini diambil karena praktik korupsi telah menjadi budaya di kalangan pejabat pemerintahan, dan hampir seluruh proyek di lingkungan Pemkot dijadikan lahan guna mengambil keuntungan pribadi. Banyak kasus korupsi yang sudah masuk dan telah ditangani oleh penegak hukum salah satunya Kejaksaan Negeri Malang.

TABEL 4.1.

DATA KASUS-KASUS KORUPSI DI KOTA MALANG

No.	Nama Proyek	Lokasi	Status
1.	Dugaan <i>mark-up</i> anggaran pengadaan lahan RSUD di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang	Kota Malang	Akan Dilaporkan
2.	Korupsi pembangunan Jembatan Kedungkandang yang disinyalir ada kongkalikong antara pejabat di lingkungan Pemkot Malang dengan Kontraktor, PT. Nugraha Adi Taruna (NAT)	Kota Malang	Ditangani Penegak Hukum
3.	Dugaan <i>mark-up</i> anggaran pengadaan paku jalan solar cell	Kota Malang	Ditangani Penegak Hukum
4.	Dugaan korupsi uji kir	Kota Malang	Monitoring
5.	Dugaan penyelewengan mekanisme pengerjaan drainase sistem jacking Kota Malang	Kota Malang	Monitoring
6.	Dugaan <i>mark-up</i> anggaran pengadaan lahan <i>Malang International Education Park</i> (MIEP) di SBI Tlogowaru, Poltekcom, SMK 10, <i>Sampoerna Academy</i> , Kedungkandang 12Hektar	Kota Malang	Dilaporkan
7.	Dugaan korupsi penyelewengan pajak	Kota Malang	Akan Dilaporkan
8.	Pengadaan lahan Terminal Hamid Rusdi	Kota Malang	Monitoring
9.	Penjualan Buku Panduan Kurikulum 2013	Kota Malang	Akan Dilaporkan
10.	Pendistribusian buku perpustakaan di Kelurahan se-Kota Malang	Kota Malang	Akan Dilaporkan
11.	Korupsi pembebasan lahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	Kota Malang	Sudah Dilaporkan Ke Kejaksaan

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013.*

⁶ Jawa Pos, Radar Malang, 22 November 2013, **Kota Malang Darurat Korupsi**, hal 33.

Tabel 4.1 menunjukkan dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi di Kota Malang. 3 (tiga) kasus berstatus monitoring, 4 (empat) kasus berstatus akan dilaporkan, 1 (satu) kasus berstatus dilaporkan, 2 (dua) kasus berstatus ditangani penegak hukum, dan 1 (satu) kasus berstatus sudah dilaporkan ke Kejaksaan. Selama ini, *Malang Corruption Watch* mengaku sering menyerahkan data perkara korupsi ke Kejaksaan. Tapi penanganannya tidak ada, dengan alasan data yang diberikan oleh *MCW* kurang konkrit.⁷ Dari 11 (sebelas) kasus yang terjadi di Kota Malang, hanya ada satu kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang yakni kasus terkait pembebasan lahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Sedangkan sisanya masih terbengkalai dan belum mendapat tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi yang disertai dengan berkembangnya modus dan cara yang dilakukan oleh koruptor saat ini hendaknya disertai dengan perbaikan kinerja aparat hukum dalam upayanya memberantas korupsi. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang melakukan penyidikan memiliki peran untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi.

Data survey menunjukkan jumlah perkara tindak pidana khusus terkait korupsi pada proses penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang tahun 2011 sampai 2013. Tahun 2011 terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana korupsi yang berhasil disidik terkait pembelanjaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas di dinas perhubungan Kota Malang yang pada akhirnya terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi. Tahun 2012 nihil dengan kata lain tidak ada kasus tindak pidana korupsi yang ditangani sepanjang tahun. Tahun 2013 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi, pertama adanya selisih pembayaran yang mengindikasikan adanya perbuatan *mark up* terhadap pengadaan lahan untuk pembangunan kampus UIN II Malang, dan yang kedua adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana bantuan hibah dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DITJEN DIKTI) Kementerian Pendidikan Nasional

⁷ *Ibid*, hal 43.

untuk pembangunan gedung serbaguna pada Kampus Universitas Kanjuruhan Malang.

Berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan laporan dugaan korupsi yang selama ini terjadi di Kota Malang yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya. Tingginya tingkat korupsi dan rendahnya kinerja Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi membuktikan banyaknya kendala atau hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas korupsi. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Faktor eksternal
 - a. Perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang multitafsir;
 - b. Ketergantungan Kejaksaan Negeri Malang kepada instansi lain untuk memperoleh informasi atau data bukti tindak pidana korupsi; dan
 - c. Laporan masyarakat tidak diimbangi oleh data yang konkrit.
2. Faktor internal
 - a. Beban tugas seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Malang;
 - b. Kualitas penyidikan yang kurang sistematis;
 - c. Kurang memadainya penyelamatan kerugian keuangan negara; dan
 - d. Keterbatasan dana operasional untuk penanganan tindak pidana korupsi.

Kendala yang telah dikemukakan diatas menjadi prioritas sekaligus sebagai masalah pokok yang menyebabkan minimnya peran Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Penyebab mendasar terjadinya kendala tersebut tidak lain merupakan akibat dari kurangnya profesionalisme, integritas, serta dedikasi khususnya Jaksa sebagai aparat penegak hukum di negara ini dalam peranannya terkait mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan kenyataan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Malang belum berjalan secara optimal.

Terkait isu permasalahan pada skripsi ini, setelah melakukan pencarian informasi yang dilakukan selama survey, skripsi ini ditujukan tidak hanya fokus pada kekurangan yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Malang, melainkan memahami sistem yang bekerja terkait isu permasalahan yang di angkat pada skripsi ini. Kejaksaan Negeri Malang telah melakukan serangkaian upaya guna meningkatkan kinerjanya terkait optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Upaya eksternal

- a. Diperlukan sosialisasi atau diskusi dengan ahli hukum terkait pemahaman peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berlaku agar perumusan pasal yang multitafsir dapat diatasi;
- b. Dalam mengatasi lamanya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK. Misalnya dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi.⁸; dan
- c. Melakukan penataran tindak pidana korupsi bagi para Jaksa agar dapat beradaptasi dan mampu mengambil sikap meskipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.⁹

2. Upaya internal

- a. Untuk meringankan beban seksi tindak pidana khusus yang masih dibebani dengan perkara pidana umum, agar konsentrasinya tidak terpecah dalam menangani tindak pidana korupsi maka pihak Kejaksaan akan mengupayakan untuk memisahkan tugas antara seksi tindak pidana umum dengan seksi tindak pidana khusus secara lebih

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 3 Januari 2014.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 3 Januari 2014.

- sistematis.¹⁰ Serta melakukan penambahan personil Jaksa untuk efisiensi dan optimalisasi kinerja Kejaksaan untuk jangka panjang;
- b. Menumbuh kembangkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini lebih bersifat inisiatif pribadi Jaksa masing-masing tetapi pelaksanaannya harus dikendalikan serta dibimbing agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti salah penafsiran, salah menginterpretasikan, kurang pemahaman terhadap ada yang akan dipahami atau hal-hal lainnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan moral dan mental terhadap kepribadian para Jaksa secara rutin dan konstan.¹¹ Pembinaan mental dan moral kepribadian yang terprogram dapat dilakukan baik melalui metode ceramah, pemahaman wawasan kebangsaan, maupun seminar penerapan kode etik profesi Jaksa; dan
 - d. Demikian pula dalam mengatasi kendala keterbatasan dana operasionalisasi yang diperuntukkan penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi maupun penanganan kasus lain, maka pihak Kejaksaan dapat mengajukan permohonan penambahan dana anggaran yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung.¹²

F. Penutup

Kesimpulan terkait isu yang dibahas pada skripsi ini adalah pada tahun 2013 merupakan tahun “Darurat Korupsi” bagi Kota Malang, hal ini dilandasi oleh hasil gelar perkara oleh masyarakat yang dilakukan pada tanggal 21 November 2013. Dari keseluruhan data terkait dugaan tindak pidana korupsi hanya ada beberapa kasus saja yang ditangani oleh Kejaksaan. Peran Kejaksaan Negeri Malang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Malang mengalami beberapa hambatan yang dinilai menjadi kendala dalam melakukan upaya penyidikan tindak pidana korupsi dan diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni kendala eksternal dan kendala

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 14 Januari 2014.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 14 Januari 2014.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Eko Cahyono, SH., selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang. pada tanggal 14 Januari 2014.

internal. Selain kendala yang dialami oleh Jaksa penyidik, pihak Kejaksaan Negeri Malang telah melakukan sarana perbaikan atau serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerjanya akibat kendala yang terjadi pada proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, saran yang diajukan antara lain Jaksa selaku penyidik pada Kejaksaan Negeri Malang hendaknya melakukan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Peran masyarakat untuk kedepannya diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penanganan khususnya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Serta adanya prioritas terhadap penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi dinilai sangat merugikan bagi seluruh kalangan.

G. Daftar pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Entitas Hukum Indonesia, “**Kejaksaan Negeri Malang Ogah-ogahan Berantas Korupsi**”. 5-17 November 2012

Jawa Pos, Radar Malang, **Kota Malang Darurat Korupsi**. 22 November 2013

Malang Corruption Watch, **Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Jawa Timur Hingga Tahun 2012**,. Malang, Malang Corruption Watch, 2013.

Suara Merdeka, **Disorientasi Pemberantasan Korupsi**, www.google.com (2 Agustus 2012), 2008.